



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

| | | | |
|----|--------------|----|--------------|
| 1. | RADAR BANTEN | 4. | SATELIT NEWS |
| 2. | BANTEN POS | | |
| 3. | KABAR BANTEN | | |

| | | | |
|----------|---------|--------------|------|
| JANUARI | MEI | 10 SEPTEMBER | 2019 |
| FEBRUARI | JUNI | OKTOBER | |
| MARET | JULI | NOVEMBER | |
| APRIL | AGUSTUS | DESEMBER | |
| | | | |

Pemerintah Dinilai Perlu Beri Ganti Untung

SEJUMLAH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang asal Serang Utara menilai, masyarakat yang akan terkena gusuran proyek revitalisasi Kali Mati atau Ciujung Lama kebanyakan merupakan masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, dewan berharap, dalam proyek tersebut, masyarakat korban gusuran bisa mendapatkan ganti untung.

Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Partai PPP Dendi Kurnia Ardiansyah mengatakan, saat ini alat berat untuk normalisasi Kali Mati Ciujung tersebut sudah mulai turun. Namun, dia berharap, sebelum penerbitan dilakukan tentunya harus ada penggantian untuk masyarakat. "Jangan ditertibkan terlebih dahulu, masyarakatnya dulu, bukan ganti rugi, tapi ganti untung untuk masyarakat sekitar yang terkena dampak normalisasi saluran kali mati itu," kata anggota dewan baru dari PPP tersebut, saat ditemui *Kabar Banten* di Ruang Komisi II, Senin (9/9/2019).

Ia menuturkan, masyarakat yang terkena dampak normalisasi tersebut, kebanyakan dari kalangan tidak mampu dan bahkan ada bangunan musala-



KONDISI aliran Kali Mati Ciujung Lama yang dipenuhi ceeng gondok dan masih ditempati sejumlah bangunan liar di Kecamatan Pontang.*

serta masjid di sekitar lokasi penerbitan. Oleh karena itu, hal tersebut, menjadi alasan pihaknya untuk mendesak pemerintah memberikan penggantian. "Supaya tidak terjadi masalah ke depan, yang saya pikirkan masjid ini kan tempat ibadah, karena permanen. Sebetulnya dari tahun 1993 itu sudah ada PT Silptera membebaskan rumah

rumah di pinggiran kali, tapi belum ditindaklanjuti pembangunannya. Sebagian ada tanah negara, sebagian milik pribadi," ujarnya.

Namun demikian, secara umum masyarakat mendukung adanya normalisasi. Karena, masyarakat setempat selama ini sangat kesulitan air bersih. "Emang banyak manfaatnya,

air di sana cukup adanya perluasan kali itu. Jadi mendukung. Karena selama ini sulit air bersih, bahkan saat kemarau untuk wudu saja tidak ada. Masyarakat harus beli air galon untuk mandi, kalau sehari mandi dua kali itu sudah berapa biayanya," tuturnya.

Anggota DPRD Kabupaten Serang dari PKS Ahmad Faisal mengatakan, masyarakat sebagian besar sudah tahu, bahwa tanah ditinggalinya merupakan tanah negara. Namun, masyarakat meminta ganti rugi untuk bangunannya. "Kalau berapa berapa itu mah hitungannya urusan ini (pemerintah), tinggal pendekatannya, sosialisasinya, tapi sebagian besar mengerti kalau itu mau di normalisasi," ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang Ajat Sudrajat masih menunggu perintah dari balai besar. Oleh karena itu, dia belum bisa melakukan penerbitan bangunan di bantaran Kali Mati Ciujung. "Kami mah lagi nunggu, sosialisasinya sudah, yang punya koordinat balai besar, yang punya *by name by adress* bangunan liar PU, pematokan sudah, sosialisasinya sudah, tinggal eksekusi, itu tombolnya di balai besar," katanya. (Dindin Hasanudin/"KB")***